

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2023)

Rully Mayangsari *¹
Suprihatmi ²

^{1,2} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

*e-mail: Rully.mayangsari@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, serta dana bagi hasil terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah perolehan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel telah lolos uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Hasil analisis regresi linear diperoleh Persamaan $Y = 46.467.799.397,602 + 0,856 X_1 - 0,624 X_2 - 3,718 X_3 + e$. Hasil uji t menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan demikian hipotesis pertama terbukti kebenarannya. Dana Alokasi Umum (DAU) (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan demikian hipotesis kedua tidak terbukti kebenarannya. Dana Bagi Hasil (DBH) (X_3) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan demikian hipotesis ketiga terbukti kebenarannya. Hasil uji F diperoleh bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah tepat. Hasil Uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.265 Artinya besarnya pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X_2) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (X_3) sebesar 26,5 %. Sisanya 73,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, belanja modal

Abstract

The aim of this research is to analyze the significance of the influence of local revenue, general allocation funds and profit sharing funds on capital expenditure in the Surakarta City government, Central Java. The type of data used is quantitative data. The data source used is secondary data acquisition. The data analysis techniques used in this research are descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F test, and coefficient of determination (R^2). The results of the classical assumption test in this study show that all variables have passed the normality, heteroscedasticity, multicollinearity and autocorrelation tests. The results of the linear regression analysis obtained the equation $Y = 46,467,799,397.602 + 0.856 X_1 - 0.624 X_2 - 3.718 X_3 + e$. The results of the t test show that Regional Original Income (PAD) (X_1) has a significant effect on capital expenditure, thus the first hypothesis is proven to be true. General Allocation Funds (DAU) (X_2) do not have a significant effect on capital expenditure, thus the second hypothesis is not proven true. Profit Sharing Funds (DBH) (X_3) have a significant effect on capital expenditure, thus the third hypothesis is proven to be true. The results of the F test showed that the regression model used in this research was correct. The results of the coefficient of determination test (R^2) are 0.265. This means that the influence of the variables Original Regional Income (PAD) (X_1), General Allocation Funds (DAU) (X_2) and Profit Sharing Funds (DBH) (X_3) is 26.5%. The remaining 73.5% is influenced by other variables not studied.

Keywords: local original income, general allocation funds, profit sharing funds, capital expenditure

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah (pemda) merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola urusan pemerintahan dan memberikan layanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut Undang-Undang tersebut, "Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Pemberian otonomi kepada daerah merupakan salah satu wujud desentralisasi dalam kebijakan pemerintahan, yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat guna menyediakan pelayanan yang lebih menyeluruh. Pelayanan yang diberikan diharapkan akan lebih merata dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah (Guntoro, 2021).

Desentralisasi fiskal dirancang untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan dalam penyediaan barang dan layanan publik, dengan mempertimbangkan kondisi serta preferensi lokal. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah daerah memiliki data dan informasi terkait kebutuhan barang publik di wilayahnya (Alvaro dan Adhi, 2020). Agar mencapai tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah harus berupaya seoptimal mungkin untuk mengembangkan potensi daerahnya. Kebebasan untuk berinovasi membuat pemerintah daerah dapat keputusan secara mandiri serta mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar daerah dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan wilayahnya (R. Hermawan dan Masyitah, 2024).

Tujuan utama diberlakukannya konsep desentralisasi melalui otonomi daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong demokratisasi ekonomi, menciptakan keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung pembangunan dan pemanfaatan sumber daya daerah. Desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Memberikan wewenang kepada daerah, diharapkan dapat tercipta sistem pemerintahan yang lebih efisien dan efektif (Yanto et al., 2023). Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya. Agar pengembangan potensi daerah dapat lebih berkembang, pemerintah kota perlu meningkatkan anggaran untuk investasi (Wisnuwardan dan Kurnia, 2023).

Melalui otonomi, setiap daerah diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Aspek krusial dari fungsi pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan. Sumber pendapatan keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan dialokasikan dalam anggaran belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah sangat mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya (Hermawan et al., 2021). Penerapan otonomi daerah akan meningkatkan tanggung jawab daerah, terutama dalam aspek keuangan. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah (Saputra et al., 2022).

Mengembangkan suatu daerah memerlukan belanja modal ketika melaksanakan desentralisasi, belanja modal didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang masuk dalam kategori investasi dan terkait dengan perolehan atau penambahan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang. Pengeluaran ini melebihi jumlah yang diperlukan untuk memenuhi syarat kapitalisasi (Darunnisa dan Herwansyah, 2024). Pengalokasian anggaran belanja modal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menganggarkan dana dalam bentuk belanja modal di APBD untuk menambah aset tetap. Penentuan alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat (Asmawiah dan Sulistiyo, 2022).

Belanja modal memiliki peran krusial dalam menjalankan sistem pemerintahan karena dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu komponen utama dalam belanja daerah, belanja modal sangat penting karena implementasinya dapat memberikan dampak positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih maju (Kuntadi et al., 2022). Belanja modal merupakan bagian dari anggaran APBD, yang telah dipertimbangkan dalam

perencanaan keuangan jangka panjang, terutama untuk pembiayaan dan pemeliharaan aset, seperti pembelian tanah, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin. Pengelolaan kas daerah harus dilakukan secara efisien agar dapat digunakan secara optimal dalam pelayanan publik, dengan mempertimbangkan manfaat (*usefulness*) serta kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam merawat aset tersebut (Kurniasari, 2021).

Menurut Syukri dan Hinaya (2019) Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan besarnya pendapatan daerah, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tingkat Kesejahteraan pada daerah dipengaruhi oleh pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan. Pembangunan ekonomi tercermin dari peningkatan produktivitas serta kenaikan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya membawa perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Kemampuan daerah dalam mewujudkan jalannya roda pemerintahan menjadi cerminan dari kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Aspek penting yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan adalah kemampuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan kekayaan asli daerah (Febrianty dan Putra, 2023).

Kota Surakarta telah fokus pada pengembangan berbagai proyek seperti revitalisasi pasar tradisional, pembangunan fasilitas kesehatan, dan infrastruktur transportasi, yang diharapkan dapat memperkuat sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai unggulan daerah. Pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif agar belanja modal dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik diharapkan mampu memperkuat kota Surakarta sebagai pusat ekonomi dan budaya di Jawa Tengah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 23, yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tujuan PAD yaitu untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah tersebut, sebagai implementasi dari prinsip desentralisasi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Citra dan Kurnia (2024) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian penelitian Wisnuwardana dan Kurnia (2023) juga mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian Srinofril dan Ananda (2023) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu instrumen fiskal yang penting dalam sistem keuangan daerah di Indonesia. DAU merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendanai belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 3, yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tujuan DAU dirancang untuk mendukung pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Penelitian mengenai dana alokasi umum telah dilakukan oleh Kurniawan dan Arifin (2024) mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian penelitian Maharani dan Triyanto (2023) juga mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian Devi dan Tjahjon (2023) mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trisnani dan Isthika (2022) mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian Lutpikah dan Mahendra (2020) mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA**

ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2023)”.**METODE**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta, dengan mengakses sumber dari website resmi Badan Pusat Statistik Kota Surakarta <https://surakartakota.bps.go.id/id>. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Realisasi pendapatan asli daerah Kota Surakarta

Bulan	Tahun		
	2021	2022	2023
Januari	22.612.644.817,00	25.222.405.105,00	33.752.113.922,00
Februari	26.312.085.279,00	37.734.591.065,00	28.715.649.644,00
Maret	79.296.068.019,00	61.056.534.643,00	66.890.365.636,00
April	33.788.168.776,00	31.997.327.498,00	31.956.531.705,00
Mei	25.893.617.630,00	33.705.033.391,00	56.639.609.665,00
Juni	64.350.853.130,00	105.629.194.772,00	72.347.149.900,00
Juli	23.262.999.003,00	43.681.815.320,00	46.374.384.549,00
Agustus	33.214.616.583,00	57.117.255.677,00	52.236.339.715,00
September	87.659.852.430,00	98.762.277.618,00	117.493.048.385,00
Oktober	34.567.738.793,00	38.932.323.221,00	42.738.164.798,00
November	28.599.785.665,00	34.595.595.066,00	43.133.802.597,00
Desember	101.021.566.961,00	79.006.231.955,00	95.049.442.184,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Surakarta, 2023

Dari perolehan jumlah dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah kota Surakarta pada tahun 2021-2023 setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Realisasi dana alokasi umum Kota Surakarta tahun 2021-2023

Bulan	Tahun		
	2021	2022	2023
Januari	67.307.783.000,00	128.683.186.000,00	114.956.328.000,00
Februari	89.743.710.667,00	65.152.093.000,00	57.478.164.000,00
Maret	44.871.855.335,00	65.152.093.000,00	80.053.134.000,00
April	64.433.533.000,00	61.498.561.614,00	62.878.164.000,00
Mei	128.867.066.000,00	65.152.093.000,00	57.478.164.000,00
Juni	64.433.533.000,00	65.152.093.000,00	57.478.164.000,00
Juli	42.955.688.670,00	65.152.093.000,00	57.478.164.000,00
Agustus	42.955.688.663,00	65.152.093.000,00	91.340.619.000,00
September	64.433.533.000,00	65.152.093.000,00	62.810.646.137,00
Oktober	64.433.533.000,00	32.576.046.500,00	85.260.179.867,00
November	64.433.535.000,00	32.576.046.500,00	57.478.169.000,00
Desember	42.955.688.665,00	65.152.125.000,00	24.431.614.133,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Surakarta, 2023

Dari perolehan jumlah dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah kota Surakarta pada tahun 2021-2023 setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Realisasi dana bagi hasil Kota Surakarta Tahun 2021-2023

Bulan	Tahun		
	2021	2022	2023
Januari	180.222.650,00	298.827.700,00	186.684.100,00
Febuari	1.943.315.669,00	42.849.800,00	31.050.000,00
Maret	11.823.613.751,00	8.713.443.050,00	10.945.565.750,00
April	1.057.068.850,00	1.383.611.150,00	3.908.717.035,00
Mei	17.601.000,00	53.562.250,00	38.812.500,00
Juni	9.808.384.450,00	9.636.633.200,00	12.345.707.850,00
Juli	7.694.939.225,00	-	-
Agustus	1.469.548.700,00	1.930.936.100,00	74.208.750,00
September	9.871.294.350,00	10.373.348.034,00	12.464.774.100,00
Oktober	7.694.939.225,00	18.299.295.759,00	5.998.131.981,00
November	1.027.427.601,00	2.965.451.450,00	16.202.320.100,00
Desember	5.177.016.713,00	1.268.043.087,00	578.891.950,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Surakarta, 2023

Untuk jumlah penggunaan belanja modal pada setiap tahunnya juga mengalami kenaikan dan penurunan. Penggunaan belanja modal berasal dari berbagai pengeluaran seperti belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Untuk rincian dari belanja modal kota Surakarta pada tahun 2021-2023 dapat dilihat seperti berikut ini :

Tabel 4. Realisasi belanja modal Kota Surakarta tahun 2021-2023

Bulan	Tahun		
	2021	2022	2023
Januari	7.645.569.500,00	24.675.000,00	7.963.278.725,00
Febuari	7.645.569.500,00	24.675.000,00	527.936.700,00
Maret	15.103.634.132,00	442.850.133,00	7.411.236.020,00
April	2.387.560.570,00	2.096.393.975,00	7.963.278.725,00
Mei	7.837.952.948,00	969.209.682,00	6.214.304.255,00
Juni	9.155.707.457,00	11.459.550.773,00	30.791.326.469,00
Juli	13.531.586.860,00	17.055.915.680,00	12.340.155.648,00
Agustus	24.989.843.075,00	25.860.753.572,00	24.328.246.174,00
September	35.693.713.681,00	20.068.510.142,00	32.174.594.979,00
Oktober	45.508.783.752,00	16.785.102.282,00	51.080.325.506,00
November	63.376.614.877,00	61.903.083.542,00	29.442.469.623,00
Desember	108.224.417.308,00	224.142.162.051,00	170.153.402.861,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Surakarta, 2023

Tabel 5. Hasil deskriptif statistik variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	22612644817	117493048385	52648532919.92	26989667462.661
DAU	36	24431614133	128867066000	65763813187.53	22975335172.834
DBH	34	17601000	18299295759	5161948172.94	5365426632.442
Belanja Modal	36	24675000	224142162051	30620121977.14	47163409921.177
Valid N (listwise)	34				

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat untuk melakukan analisis regresi, agar regresi sebagai estimasi bisa tepat/tidak bias/tidak menyimpang.

Hasil uji Normalitas

Tabel 6. Hasil uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000040
	Std. Deviation	39551651713.78874000
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.126
	Negative	-.110
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.187 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui besarnya *p-value* (signifikansi) *Asymp. Sig. (2 tailed)* = 0,187 > 0,05 sehingga menunjukkan keadaan yang tidak signifikan, artinya bahwa residual berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

Hasil uji heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil uji heteroskedastisitas

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32484831094.762	18804611909.447		1.727	.094
PAD	.359	.181	.370	1.977	.057
DAU	-.212	.202	-.186	-1.048	.303
DBH	-1.734	.948	-.346	-1.830	.077

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan p-value (sig) dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 0,057, Dana Alokasi Umum (DAU) = 0,303 dan Dana Bagi Hasil (DBH) = 0,077 > 0,05 (tidak ada yang signifikan) ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas (lolos uji heteroskedastisitas).

Hasil uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	46467799397.602	30493721260.672		1.524	.138		
PAD	.856	.294	.491	2.911	.007	.784	1.276
DAU	-.624	.328	-.304	-1.901	.067	.868	1.152
DBH	-3.718	1.537	-.412	-2.420	.022	.767	1.304

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Hasil dari tabel diatas menunjukkan nilai *Tolerance* Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 0,784, Dana Alokasi Umum (DAU) = 0,868 dan Dana Bagi Hasil (DBH) = 0,767 > 0,10 dan nilai VIF untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 1,276, Dana Alokasi Umum (DAU) = 1,152 dan Dana Bagi Hasil (DBH) = 1,304 < 10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas atau model regresi tersebut lolos uji multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-9279974030.55191
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	17
Total Cases	34
Number of Runs	16
Z	-.522
Asymp. Sig. (2-tailed)	.601
a. Median	

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	46467799397.602	30493721260.672		1.524	.138
PAD	.856	.294	.491	2.911	.007
DAU	-.624	.328	-.304	-1.901	.067
DBH	-3.718	1.537	-.412	-2.420	.022

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Dari Tabel di atas diperoleh Persamaan Regresi :

$$Y = 46.467.799.397,602 + 0,856 X1 - 0,624 X2 - 3,718 X3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah :

- a. Koefisien konstanta a= 46.467.799.397,602 bertanda (positif) artinya jika X1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) = 0, X2 (Dana Alokasi Umum (DAU)) = 0, X3 (Dana Bagi Hasil (DBH)) = 0 maka Y (Belanja Modal) sebesar Rp. 46.467.799.397,602.
- b. Koefisien konstanta b1= 0,856 Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal artinya : jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp.1,- maka Y (Belanja Modal) akan meningkat sebesar Rp. 0,856, dengan asumsi variabel X2 (Dana Alokasi Umum (DAU)), dan X3 (Dana Bagi Hasil (DBH)) konstan/tetap.
- c. Koefisien konstanta b2= -0,624 (Dana Alokasi Umum (DAU)) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal) artinya : jika Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar Rp.1,- maka Y (Belanja Modal) akan menurun sebesar Rp. 0,624,- dengan asumsi variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) dan X3 (Dana Bagi Hasil (DBH)) konstan/tetap.
- d. Koefisien konstanta b3= -3718 (Dana Bagi Hasil (DBH)) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal) artinya : jika Dana Bagi Hasil/DBH meningkat sebesar Rp.1,- maka Y (Belanja Modal) akan menurun sebesar Rp. 3,718,- dengan asumsi variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) dan X2 (Dana Alokasi Umum (DAU)) konstan/tetap.

Hasil Uji t

Tabel 11. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	46467799397.602	30493721260.672			1.524	.138
PAD	.856	.294	.491		2.911	.007
DAU	-.624	.328	-.304		-1.901	.067
DBH	-3.718	1.537	-.412		-2.420	.022

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh uji t sebagai berikut :

- 1) Diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,007 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya X1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) berpengaruh signifikan terhadap Y (Belanja Modal).
- 2) Diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,067 > 0,05 maka H0 diterima artinya X2 (Dana Alokasi Umum (DAU)) berpengaruh tidak signifikan terhadap Y (Belanja Modal).
- 3) Diperoleh nilai p-value (signifikansi) = 0,022 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya X3 (Dana Bagi Hasil (DBH)) berpengaruh signifikan terhadap Y (Belanja Modal).

Hasil Uji F

Tabel 12. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25682589279631593000000.000	3	8560863093210531000000.000	4.975	.006 ^b

Residual	5162299405853200000000.000 30 1720766468617733100000.000
Total	77305583338163590000000.000 33

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 4,975 dengan nilai signifikansi (p. Value) sebesar $0,006 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model tepat dalam memprediksi X1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)), X2 (Dana Alokasi Umum (DAU)) dan X3 (Dana Bagi Hasil(DBH)) terhadap variabel terikat Y (Belanja Modal).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.576 ^a	.332	.265	41482122277.166

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R²) untuk model ini adalah sebesar 0.265 Artinya besarnya pengaruh variabel independen X1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD)), X2 (Dana Alokasi Umum (DAU)) dan X3 (Dana Bagi Hasil (DBH)) sebesar 26,5 %. Sisanya (100% - 26,5 %) = 73,5 % diterangkan oleh variabel lain diluar model yang diteliti misalnya dana alokasi khusus, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang sudah diperoleh dan pembahasannya, maka kesimpulan mengenai penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2023) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta
3. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta

Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka saran yang dapat diberikan yang nantinya dapat menjadi masukan yang terkait pada variabel yang diteliti, antara lain :

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah, serta pemerintah daerah diharapkan mengeksplor peluang-peluang pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan. Karena dengan semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka penyerapan dana bisa merata dan dapat meningkatkan belanja modal. Selain itu juga, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya dana perimbangan dengan baik yang merupakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat sehingga belanja modal dapat bertambah setiap tahunnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah jumlah sampel dan menambah cakupan daerah penelitian, seperti memperpanjang periode tahun penelitian dan

menggunakan data dari pemerintah provinsi sehingga cakupan daerah penelitian tidak terbatas hanya mengambil lingkup pemerintah daerah kota untuk dapat memperkuat pengolahan data pada penelitian serta diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi belanja modal seperti dana alokasi khusus, retribusi daerah, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvaro, R., & Adhi, P. (2020). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 103–120.
- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Anonim. (2021). *Badan Pusat Statistik Kota Surakarta*. BPS Surakarta. <https://surakartakota.bps.go.id/id>
- Asmawiah, S. H., & Sulistiyo, H. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4150–4157
- Citra, Y., & Kurnia. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(3), 1–24.
- Darunnisa, L. P., & Herwansyah. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Tingkat Inflasi terhadap Belanja Modal di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 1773–1784.
- Devi, A. A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 3(3), 1104–1126.
- Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *JKA : Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 30–46.
- Firdaus, & Zamzam, F. (2018). *Aplikasi metodologi peneltia*. Yogyakarta : Deepublish.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, P. Y., Tiawon, H., & Neneng, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 2(3), 242–248.
- Hermawan, R., & Masyitah, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Widya*, 5(1), 204–218.
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Fitriyanti, D. D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 269–280.
- Kurniasari, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Urnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3), 1–23.
- Kurniawan, D. S., & Arifin, A. (2024). Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Aloksi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Jawa Tengah Tahun 2019-202. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1764–1778.

- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- M. Amin. (2017). *Memahami Keuangan Daerah* (Ed. I). Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Marheni, R., & Triyanto, E. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 4223–4240.
- Saputra, Y. B., Firdaus, Fakhruddin, I., Rianto, R., Pratiwi, P. N., & Nurhayati. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kabupaten Bengkalis. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1137–1141.
- Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26–36.
- Wisnuwardan, G. A., & Kurnia. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi(JIRA)*, 12(10), 1–18.
- Yanto, A., Azzahra, N., Gladisya, A., Zakirin, M. M., & Anawar, M. S. (2023). Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 8321–8332.